

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PEMAPARAN KINERJA ATAS EFEKTIVITAS UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI SAP BERBASIS AKRUAL 2014 DAN 2015 WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, **Jumat (6 Nopember 2015)** – Hari ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelenggarakan acara **Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Dan Pemaparan Kinerja Atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Implementasi SAP Berbasis Akrual 2014 Dan 2015 Wilayah Provinsi Jawa Tengah**. Pemeriksaan tersebut dilatarbelakangi PP nomor 71 tahun 2010 dan Permendagri No. 64 tahun 2013 sebagai landasan penerapan akuntansi berbasis akrual pada Pemda yang harus dilaksanakan pada tahun 2015.

Di Jawa Tengah, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan pemeriksaan kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Implementasi SAP Berbasis Akrual 2014 Dan 2015 di delapan entitas yaitu Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta, Kota Magelang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan.

Pemeriksaan atas beberapa pemda ini diperoleh gambaran Implementasi SAP berbasis Akrual pada Pemda dan akan menjadi bahan/gambaran bagi pemda yang tidak dijadikan uji petik untuk mendapatkan *lesson learned* untuk memperbaiki upaya yang telah dilakukan.

Pada kesempatan ini, dipaparkan tentang efektivitas upaya pemda dalam implementasi SAP Berbasis Akrual di Jawa Tengah yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah, Hery Subowo, S.E., M.P.M., Ak., C.A., C.I.A., C.F.E. Dalam paparannya, Kepala Perwakilan antara lain menyampaikan tentang proses dan hasil pemeriksaan pemda di wilayah Jateng.

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, secara umum diperoleh gambaran persiapan pemda dalam implementasi SAP Berbasis Akrual, antara lain adalah Pemda belum memiliki dokumen perencanaan strategis yang komprehensif untuk mengimplementasikan SAP berbasis akrual, Pemda berpotensi mengalami kesulitan dalam penyajian kembali laporan keuangan tahun sebelumnya (*restatement*) di awal penerapan SAP berbasis akrual, SDM pemda untuk mendukung implementasi SAP berbasis akrual belum memenuhi syarat kompetensi dan perangkat regulasi dan sistem aplikasi yang digunakan pemda dalam implementasi SAP berbasis akrual belum selaras. Dari kendala-kendala tersebut, BPK menghimbau Pemda agar menyusun *roadmap* implementasi SAP berbasis akrual, dan menyiapkan langkah-langkah taktis dalam aspek regulasi, SDM, dan TI.